

RINGKASAN

Peran penegak hukum khususnya polisi sangat penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Polisi menjadi pihak pertama yang berhadapan langsung dengan ABH serta menjadi pihak terdepan dalam penanganan ABH. Hal ini yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi dan penanganan penyidik Polsek Wilayah Purwokerto terhadap ABH serta pemahaman peraturan perundang-undangnya. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian adalah penyidik Polsek Wilayah Purwokerto yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Kepolisian Polsek Wilayah Purwokerto mempunyai persepsi bahwa ABH harus dilindungi melihat sebab dan faktor sang anak berperilaku menyimpang. Penyidik selalu mengupayakan mekanisme *Restorative Justice* dengan cara diversi, selain itu penyidik selalu menghubungi pihak terkait saat proses penyidikan ABH seperti BAPAS dan PPT-PKBGA. Namun, beberapa penyidik belum memahami betul Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 yang secara rinci menjabarkan pedoman dalam penanganan ABH. Selain itu kendala dalam upaya diversi sang anak dikarenakan pihak korban yang tidak bisa menerima tindakan sang anak dan tetap memprosesnya ke jalur hukum, atau tak ada kesepakatan dalam *Restorative Justice* pada saat diversi di Kepolisian.

Pemerintah beserta jajarannya perlu menggiatkan sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 kepada para penegak hukum khususnya Kepolisian agar dapat berjalan optimal, serta perlindungan terhadap ABH bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Sudah seharusnya *Restorative Justice* dan diversi diberlakukan pada ABH, tentunya dengan klasifikasi tertentu

Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Penegak Hukum, *Restorative Justice*

SUMMARY

The role of law enforcement agencies especially the police is very important in handling the child in conflict with the law. The police became the first party who are dealing directly with the children and became the leading party in the handling of children. This is what aspects influenced the research done. The purpose of this research is to know the perception and treatment of Purwokerto Area Polsek investigators against the child in conflict with the law and understanding regulations. Research using qualitative research methods are descriptive. A goal of the research was investigating Polsek Region selected Purwokerto using purposive sampling

The research results show that investigators police sector police areas purwokerto have perception that abh to be covered see for and factors the son behave deviating .Investigators always seek mechanism restorative justice by means of diversi , in addition investigators always contact related parties when processing investigation abh as bapak and PPT-PKBGA .But , some investigators not understand how to manage and the act of criminal justice systems children no.11 years 2012 in detail outline the abh handling .In addition a constraint for efforts to diversi the son because the victims can not accept the act of the son and remain proceeds it to legal process , or there are no pacts in restorative justice when there police

The government their staff need to activate socialization the act of criminal justice systems children No.11 2012 to the law enforcement especially police to can optimally, and protection against abh it will go according to expected.Should have been restorative justice and diversi applied in abh, albeit certain classification

Keywords: Children in Conflict with the Law, The Law Enforcement, *Restorative Justice*